

2019, Latinusa Targetkan Cetak Laba

JAKARTA – PT Pelat Timah Indonesia Tbk atau Latinusa (NIKL) menargetkan mampu membukukan laba bersih pada tahun ini, dari rugi bersih yang dibukukan tahun lalu sebesar US\$ 1,53 juta. Perusahaan yang bergerak pada bisnis manufaktur baja lapis timah ini berharap mampu menekan rugi kurs menjadi US\$ 600 ribu tahun ini dari rugi kurs 2018 US\$ 2,3 juta.

Direktur Keuangan Latinusa Jetrinaldi mengatakan, perseroan berharap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak stabil pada 2019. Pasalnya, kondisi ini sangat berpengaruh dalam menekan rugi selisih kurs.

Dia meyakini fundamental keuangan perseroan lumayan kuat. Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan besarnya target laba bersih tahun ini.

“Selama ini, kami mengimpor bahan baku dalam mata uang dolar. Dan faktor nilai tukar dollar AS itu di luar kendali,” jelas dia usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (26/3).

Jetrinaldi menambahkan, pemegang saham perseroan yakni konsorsium Jepang menjamin ketersediaan bahan baku utama Tin Mill Black Plate (TMBP). Seperti diketahui, perseroan dimiliki konsorsium Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Mitsui Co. Ltd, Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation dan Metal One.

Tahun ini, perseroan mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) 2019 sebesar US\$ 3,6 juta. *Capex* bakal diserap untuk biaya perawatan mesin dan meningkatkan utilisasi produksi hingga ke posisi 100%. Tahun lalu, utilisasi produksi mencapai 85%. Seluruh pendanaan *capex* berasal dari kas internal.

“Tahun lalu, dari total kapasitas produksi 165.000 ton, utilisasi baru mencapai 85%, sehingga tahun ini diharapkan 100%,” kata dia. Sementara itu, Direktur Utama Pelat Timah Indonesia Ardhiman T.A mengatakan, strategi perseroan tahun ini adalah fokus mengincar segmen pelanggan menengah atas seperti produsen kemasan makanan, minuman dan susu.

Tahun lalu, perseroan mencetak penjualan sebesar US\$ 163,13 juta, melonjak 7,5% dibanding penjualan tahun lalu US\$ 151,79 juta. Penjualan perseroan ditopang oleh penjualan *tinplate* dalam bentuk gulungan yang naik 15% yoy menjadi US\$ 100,37 juta di akhir 2018. Lalu, untuk segmen penjualan *tinplate* dalam bentuk lembaran (*sheet*) menyumbang sebesar US\$ 62,75 juta atau turun 3,3% yoy.

Sementara itu, beban pokok juga tercatat membengkak sebesar 9,31% menjadi US\$ 154,76 juta pada tahun lalu dari tahun sebelumnya US\$ 141,57 juta. Dari sisi aset, tahun 2018 tercatat US\$ 147,77 juta, meningkat dari tahun sebelumnya US\$ 126,12 juta. (e01)

Rugi Bersih Bumi Mineral Menyusut Jadi US\$ 103,5 Juta

JAKARTA – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) berhasil menekan rugi bersih dari US\$ 232,99 juta menjadi US\$ 103,5 juta pada akhir 2018. Walaupun total pendapatan perseroan turun dari US\$ 5 juta menjadi US\$ 1,18 juta.

Direktur dan *Investor Relations* Bumi Resources Minerals Herwin W Hidayat mengatakan, pihaknya berhasil memperbaiki kinerja keuangan atas tahun buku 2018. Bahkan, kas dan setara kas, maupun rasio likuiditas perseroan juga mulai meningkat.

“Sampai akhir 2018, perseroan memiliki total kas dan setara kas sebesar US\$ 8,2 juta, naik 56,19% dari posisi sebelumnya US\$ 5,25 juta,” ujar Herwin dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/3).

Lebih lanjut, dia menyampaikan, perseroan juga berhasil menurunkan *debt to equity ratio* (DER) dari 0,17 kali menjadi 0,38 kali. Sedangkan, *net debt to equity* Bumi Minerals juga membaik, yakni dari 0,09 kali menjadi 0,37 kali.

Bumi Minerals meraih perbaikan rasio tersebut, pasca membukukan total ekuitas sebesar US\$ 564,31 juta. Kondisi ekuitas tersebut meningkat 8,74% jika dibandingkan realisasi

sebelumnya yang sebesar US\$ 518,95 juta.

Adapun, Herwin menyatakan, kini kondisi kas dan deposito perseroan tengah bertambah dan membuat emiten ini, melalui PT Citra Palu Minerals (CPM) sudah memulai pekerjaan konstruksi di proyek tambang emas dan proyek bijih seng melalui PT Dairi Prima Minerals (DPM).

Direktur Bumi Resources Mineral Suseno Kramadibrata mengemukakan, DPM dan CPM dapat melakukan ekspansi karena kedua proyek tambangnya sudah meraih izin produksi selama 30 tahun. Adapun, khusus CPM, mendapat tambahan izin konstruksi selama tiga tahun sejak 2017.

“Menyusul CPM dan DPM, bulan lalu PT Gorontalo Minerals juga berhasil mendapat izin konstruksi selama tiga tahun dan izin produksi atas tambang tembaga dan emas selama 30 tahun,” papar dia.

Herwin sebelumnya menjelaskan, Bumi Minerals, melalui CPM, optimistis memproduksi emas perdana pada November 2019. Target produksi tahap awal sekitar 100 ton dengan kebutuhan investasi di bawah US\$ 12 juta. (dka)



Capex Latinusa

Direktur Utama PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL)/Latinusa Ardhiman TA (tengah) berbincang dengan jajaran direksi, Jetrinaldi (kiri) dan Yulia Heryati, di sela paparan publik di Jakarta, Selasa (26/3/2019). Pada tahun 2019, perseroan menganggarkan belanja modal (*capex*) sebesar US\$3,6 juta dalam upaya melakukan penetrasi pasar. Hingga akhir 2018 jumlah liabilitas NIKL mencapai US\$104 juta dan total ekuitas sebesar US\$43,05 juta, sehingga total aset perseroan di akhir 2018 tercatat sebesar US\$147,78 juta.

Adhi Segera Kantongi Rp 1,5 Triliun terkait Proyek LRT

Oleh **Farid Firdaus**

► JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) segera menerima pembayaran berkelanjutan dari proyek *light rail transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) tahap I sebesar Rp 1,5 triliun pada April 2019. Nilai tersebut merupakan bagian dari sisa pendanaan yang belum dibayarkan senilai Rp 6 triliun.

Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi mengatakan, hingga saat ini, perseroan telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp 6 triliun dari target pembayaran proyek LRT Jabodebek tahap I senilai total Rp 12 triliun. Pembayaran tersebut berasal dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk pemerintah sebagai investor proyek LRT. “Saat ini, perseroan sedang proses pencairan Rp 1,5 triliun. Kami harap segera menerima,” jelas dia di Jakarta, Selasa (26/3).

Sebelumnya, Adhi Karya sudah menyerahkan tingkat penggunaan dana investasi sebesar Rp 12 triliun kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, perseroan memperkirakan nilai investasi LRT mencapai Rp 22,3 triliun. Dana tersebut bakal diserap untuk pengerjaan jalur, stasiun dan depo, fasilitas operasi, dan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai proyek.

Hingga 1 Maret, Adhi Karya telah melaksanakan pembangunan LRT Jabodebek tahap I sebesar 59%. Rinciannya, perseroan membangun lintas pelayanan I yang mencakup area Cawang-Cibubur dengan progres pembangunan 79,2%. Kemudian, lintas pelayanan dua, area Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dengan pengerjaan 46,9%, serta pembangunan lintas pelayanan tiga dengan cakupan wilayah Cawang-Bekasi mencapai 53,4%.

Tahun ini, Adhi Karya mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 4 triliun. Menurut Entus, sebagian kebutuhan *capex* bakal berasal dari penerbitan

umum berkelanjutan (PUB) II. Saat ini perseroan memiliki sisa PUB II sebesar Rp 2 triliun. Penerbitan dilakukan paling lambat Juni 2019.

“Kita lihat dahulu tingkat kuponnya, apakah cukup menarik atau tidak. Masa berlaku sisa PUB tersebut adalah pertengahan tahun ini,” jelas dia.

Gandeng Jerman

Sebelumnya, Adhi Karya berencana menggandeng perusahaan asal Jerman untuk menggarap proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah menjadi energi (*waste to energy*). Perseroan memperkirakan nilai proyek energi terbarukan (Ebt) tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyatakan, pihaknya tengah bersiap menggarap dan menjadi salah satu investor untuk proyek pembangkit listrik Ebt yang menggunakan sampah sebagai energi. Namun karena proyek tersebut masih baru di Indonesia, pihaknya memilih bekerja sama dengan perusahaan Jerman yang sudah mumpuni dengan teknologi tersebut.

“Berdasarkan rencana, terdapat tiga pihak yang berpartisipasi, dua lokal dan satu perusahaan asing. Untuk lokal, Adhi Karya dan salah satu rekanan dari Indonesia, rencananya bersama-sama menggendong total saham 55% dan sisa 40% dimiliki perusahaan Jerman,” ujar Budi belum lama ini.

Mengenai *independent power producer* (IPP) yang akan mengelola Ebt jenis *waste to energy*, belum dapat dia paparkan lebih detil, sepe-

nya identitas dua calon rekanan yang digandeng. Namun Budi menyampaikan, persentase saham yang dimiliki rekanan asal Jerman akan lebih besar daripada dua perusahaan lokal asal Indonesia.

Pasalnya, dari segi perusahaan lokal, masih terbilang baru untuk teknologi menggarap sampah dan sampai akhirnya dapat menjadi energi untuk pembangkit listrik. “Soalnya hal itu masih baru bagi kami, sehingga sambil berinvestasi perseroan juga belajar lagi mengenai pembangkit listrik *waste to energy* ini,” tegas dia.

Adapun sejauh ini Adhi Karya dan kedua rekanannya belum menandatangani kontrak jual beli listrik (*power purchase agreement/PPA*) dengan PT PLN untuk Ebt jenis *waste to energy*. Sebab, Budi mengakui, pihaknya perlu melanjutkan diskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta.

“Kami masih perlu melanjutkan pembicaraan dengan Pemrov DKI Jakarta, karena pembangkit listrik yang akan dibangun ini berlokasi di Marunda, Jakarta Utara,” papar dia.

Lebih lanjut, Budi mengakui, terdapat pertimbangan bahwa kapasitas listrik dari Ebt *waste to energy* yang pihaknya garap mencapai 50 megawatt (Mw). Namun demikian, dia menegaskan, sejauh ini perseroan masih perlu melakukan beberapa persiapan.

“Intinya, kami mencoba menggarap hal baru. Lalu hal yang kedua, karena perseroan merupakan bagian dari badan usaha milik negara (BUMN) yang perlu berkontribusi dan sampah merupakan persoalan umum, yang sebetulnya dapat menjadi peluang bisnis,” ungkap dia.

Di samping menjadi salah satu investor yang akan memiliki saham di calon IPP yang mengelola Ebt jenis *waste to energy* di Marunda tersebut.

Sebelumnya, Adhi Karya juga akan menjadi kontraktor dari pembangkit listrik tersebut. Budi berharap, proyek Ebt jenis *waste to energy* akan berkontribusi terhadap kontrak baru, yang tahun ini dibidiki sebesar Rp 32 triliun oleh Adhi Karya. “Selain pembangkit listrik, kami juga akan menggarap beberapa proyek lain, antara lain sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan jalan tol,” ujar dia.

Ditopang Lahan Industri, Pendapatan Puradelta Capai Rp 1,04 Triliun

JAKARTA – PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) membukukan pendapatan sebesar Rp 1,04 triliun sepanjang 2018. Pendapatan ini paling besar dikontribusikan oleh penjualan lahan industri sebesar Rp 859 miliar. Pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,34 triliun.

Direktur Independen Puradelta Lestari Tony Suwanto menjelaskan bahwa 2018 merupakan tahun yang cukup menantang bagi sektor properti industri di Indonesia, terutama dengan dinamika politik di Indonesia yang cukup aktif sepanjang 2018 seperti pelaksanaan Pilkada Jawa Barat dan persiapan Pemilu 2019.

Selain itu, dinamika situasi global juga masih tidak menentu di sepanjang tahun 2018. “Dengan berbagai banyaknya ketidakpastian global maupun domestik yang terjadi, kebanyakan investor potensial, khususnya investor asing, memilih untuk mengamati dulu perkembangan di Indonesia sebelum mengambil keputusan,” kata Tony dalam penjelasan resmi, Selasa (26/3).

Dia menegaskan, hal tersebut mempen-

garuhi pencapaian pendapatan usaha perseroan pada 2018. Namun, permintaan lahan industri sudah mengalami peningkatan sejak akhir 2018. Saat ini, proses negosiasi dengan beberapa investor potensial sendiri sedang berjalan. “Kami yakin bahwa Perseroan bisa meraih penjualan yang lebih baik di tahun 2019,” ujarnya.

Segmen industri menyumbang 82,9% dari total pendapatan usaha perseroan, sedangkan segmen hunian dan komersial masing-masing menyumbang 9,1% dan 6,5% dari total pendapatan usaha perseroan. Sisanya sejumlah 1,5% pendapatan usaha Perseroan disumbangkan oleh segmen hotel dan sewa.

Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp 581 miliar dengan margin laba kotor sebesar 56,1%. Margin laba kotor tersebut lebih rendah dibandingkan margin laba kotor pada tahun sebelumnya sebesar 61% karena pada 2018 perseroan membukukan penjualan atas lahan di zona industri yang baru dibuka dan dikembangkan, sehingga terjadi peningkatan beban pokok pendapatan.

Di tingkat laba usaha, perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 415 miliar

pada 2018, lebih rendah dibandingkan laba usaha sebesar Rp 624 miliar pada 2017, seiring dengan menurunnya pendapatan usaha.

Adapun keuntungan dari kegiatan pengelolaan dan lain-lain meningkat sebesar 210,3% dari Rp 23 miliar pada 2017 menjadi Rp 72 miliar pada 2018 seiring dengan meningkatnya aktivitas industri di kawasan industri GIC di Kota Delamas. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 496 miliar dengan margin laba bersih sebesar 47,9%.

Dari sisi fundamental, jumlah aset perseroan per 31 Desember 2018 tercatat Rp 7,5 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan aset perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7,47 triliun. Posisi kas bersih perseroan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 745 miliar. Perseroan tidak memiliki utang.

Dengan posisi kas bersih yang sehat, perseroan terus berupaya untuk melakukan pengembangan Kota Delamas untuk mewujudkan Kota Delamas sebagai kawasan terpadu modern di timur Jakarta dengan memadukan kawasan industri, hunian, dan komersial. (jm)



PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RAPAT)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 18 April 2019
Pukul : 10:00 - selesai
Tempat : Mezzanine Ballroom – Mezzanine level Hotel Aryaduta Jakarta
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tertdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penempatan susunan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan/atau Direksi Perseroan serta penentuan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Pemberitaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV")) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PUT IV.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-4 terkait perubahan anggota pengurus Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan adanya maksud dari Perseroan untuk meningkatkan modal dasar serta perubahan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengimprim surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili (berdasarkan surat kuasa yang sah) dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Registrasi Rapat pada tanggal 18 April 2019 akan dibuka mulai pukul 09:30 WIB dan ditutup pukul 09:50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesuai sebelum dimulainya Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi pemegang saham perorangan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir, serta wajib dilengkapi dengan buku salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan,
 - c. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Perseroan di PT Lippo Karawaci Tbk, Menara Matahari Lantai 22, Jalan Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Sentral, Tangerang 15811, Banten (Kantor Perseroan). Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.lippokarawaci.co.id
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yaitu pada hari Jumat, 12 April 2019 pukul 16:00 WIB.
8. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal rapat. Bahan-bahan rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat.
9. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPST Tahunan tersedia di situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir tepat sebelum waktunya 30 menit sebelum jadwal RUPST Tahunan.

Tangerang, 27 Maret 2019
Direksi Perseroan